

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA		HUKUM TATA NEGARA	T=2	P=14	VI	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
	1. Dr. Rosmini, S.H.,M.H. 2. Harry Setya Nugraha, S.H.,M.H.		Dr. Rosmini, S.H.,M.H.		K.Wisnu Warhana, S.H,M.H	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1 (S3)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;				
	CPL2 (S4)	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;				
	CPL3 (S5)	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;				
	CPL4 (S7)	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;				
	CPL5 (KU1)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				
	CPL6 (KU3)	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.				

CPL7 (KK)	Memiliki kemampuan menganalisis tentang konsep mengenai Negara dan Hukum Kelembagaan Negara/ organ-organ Negara, Memiliki Kemampuan menganalisis fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang tercermin pada lembaga-lembaga Negara, tentang wewenang dan tugas dari lembaga-lembaga Negara serta hubungannya satu sama lain, mampu menganalisis hubungan kelembagaan Negara di Pusat dan di Daerah, serta hubungan antara lembaga Negara (sistem pemerintahan) dengan HAM dan warga Negara, serta mampu mengajukan solusi terhadap permasalahan yang timbul
CPL8 (P)	Mampu memahami tentang hubungan antar lembaga negara yang ada di Indonesia.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK1	Berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta kemajuan peradaban dengan tetap memegang nilai-nilai Pancasila;
CPMK2	Mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan untuk memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa;
CPMK3	Mampu menerapkan nilai-nilai hukum yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
CPMK4	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan kegiatan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang di tekuni.
CPMK5	Mampu menganalisis tentang konsep mengenai Negara dan Hukum Kelembagaan Negara/ organ-organ Negara, Memiliki Kemampuan menganalisis fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang tercermin pada lembaga-lembaga Negara, tentang wewenang dan tugas dari lembaga-lembaga Negara serta hubungannya satu sama lain, mampu menganalisis hubungan kelembagaan Negara di Pusat dan di Daerah, serta hubungan antara lembaga Negara (sistem pemerintahan) dengan HAM dan warga Negara, serta mampu mengajukan solusi terhadap permasalahan
CPMK6	Mampu memahami serta menjelaskan materi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga negara berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis perkembangan sejarah, teori dan praktik tentang perorganisasian kekuasaan dan tentang lembaga Negara
Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian organ atau lembaga Negara dari beberapa ahli.
Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang lembaga Negara yang disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang fungsi lembaga Negara yang bersifat utama atau primer dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis cara pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya; tugas, fungsi dan kewenangannya serta hak anggota.
Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang hubungan DPR dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya.
Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya, tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota, hubungan DPD dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya.
Sub-CPMK8	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan MPR dengan Lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya.
Sub-CPMK9	Mahasiswa mampu menganalisis cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan lembaga kepresidenan dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya (Tentang Lembaga Kepresidenan)
Sub-CPMK10	Mahasiswa mampu menganalisis cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan MA dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. (Tentang Mahkamah Agung)
Sub-CPMK11	Mahasiswa mampu menganalisis cara pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan MK dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya.
Sub-CPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang Lembaga Negara yang Bersifat Penunjang (<i>Auxiliary State Organs</i>): di tingkat nasional atau pusat dan daerah atau lokal yang memiliki sifat <i>constitutional importance</i>
Sub-CPMK13	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Pusat)

	Sub-CPMK14	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Daerah).													
Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK															
		Sub-C PMK1	Sub-C PMK2	Sub-C PMK3	Sub-C PMK4	Sub-C PMK5	Sub-C PMK6	Sub-C PMK7	Sub-C PMK8	Sub-C PMK9	Sub-C PMK1 0	Sub-C PMK1 1	Sub-C PMK1 2	Sub-CP MK 13	Sub-CP MK 14
	CPL1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teori-teori lembaga negara sebagai bagian dari Hukum Tata Negara, serta hubungannya dengan ilmu lain, sumber-sumber Hukum Kelembagaan Negara, lembaga Negara berdasarkan fungsi kekuasaan Negara dalam sistem Pemerintahan Presidensial baik di pusat maupun di daerah, cara menepati jabatan dan berakhirnya masa jabatan pejabat, pembentukan lembaga Negara, tugas, fungsi serta kewenangan baik lembaga Negara yang berada di pusat maupun di daerah, serta hubungannya dengan HAM dan warga negara.														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan sejarah, teori, dan praktik tentang perorganisasian kekuasaan dan tentang lembaga Negara 2. Organ atau Lembaga Negara dari beberapa ahli 3. Lembaga Negara yang disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 4. Fungsi lembaga Negara yang bersifat utama atau primer dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5. Pembentukan jabatan, cara menepati jabatan dan berakhirnya; tugas, fungsi dan kewenangannya serta hak anggota (Tentang DPR) 														

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Hubungan DPR dengan lembaga Negara lainnya dan penerapannya 7. Pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya, tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota, hubungan DPD dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. 8. Pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan MPR dengan Lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. 9. Tentang Lembaga Kepresidenan 10. Tentang Mahkamah Agung 11. Pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. 12. Lembaga Negara yang Bersifat Penunjang (<i>Auxiliary State Organs</i>): di tingkat nasional atau pusat dan daerah atau lokal yang memiliki sifat <i>constitutional importance</i> 13. Fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Pusat) 14. Fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Daerah)
<p>Pustaka</p>	<p>Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press ▪ Bintan R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011.Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006.Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ -----. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ -----. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty ▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketatanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara ▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress ▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI ▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta ▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni ▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya. Jakarta : Ghalia Indonesia ▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 						
	Pendukung :						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurnal-jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hubungan Hukum Antar Lembaga Negara ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet 						
Dosen Pengampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Rosmini, S.H.,M.H. 2. Harry Setya Nugraha, S.H.,M.H. 						
Mata Kuliah syarat	Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis perkembangan sejarah, teori dan praktik tentang perorganisasian kekuasaan dan tentang lembaga Negara	Mampu menjelaskan dan menganalisis perkembangan sejarah, teori dan praktik perorganisasian kekuasaan dan tentang Lembaga Negara	Kriteria: Ketepatan dalam memberikan penjelasan serta menganalisis perkembangan sejarah, teori dan praktik perorganisasian kekuasaan dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintang R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan 	5%

			<p>tentang Lembaga Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Whatsapp 	<p>Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011.Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras 	
--	--	--	---	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarso. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty ▪ Joeniarso. 1983. Sejarah Ketatanegaraan 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>RI. Jakarta : Bina Aksara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress ▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI ▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta ▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni ▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia ▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian organ atau	Mampu memberikan penjelasan serta memahami tentang	Kriteria: Ketepatan dalam memberikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan 	5%

	<p>lembaga Negara dari beberapa ahli.</p>	<p>pengertian dari organ atau Lembaga Negara menurut pendapat ahli.</p>	<p>penjelasan dan memahami tentang pengertian dari organ atau Lembaga Negara menurut pendapat ahli.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<p>(https://mols.unmul.ac.id)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<p>Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bintang R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. 	
--	---	---	--	---	--	--	--

						<p>Jakarta: Gramedia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara ▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress ▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI ▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none">▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia▪ UUD Negara RI 1945▪ Berbagai Peraturan	
--	--	--	--	--	--	---	--

						perundang-undangan yang berlaku	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang lembaga Negara yang disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia	Mampu memberikan penjelasan dan memahami tentang lembaga Negara yang disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.	<p>Kriteria: Ketepatan dalam menjelaskan dan memahami tentang lembaga Negara yang disebut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.</p> <p>• Bentuk: Non Test</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi <p>Test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning (PBL)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintan R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialisme Multipartai Di 	5%

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuis 			<p>Indonesia. Bandung: Mizan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketatanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none">▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
4	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang fungsi lembaga Negara yang bersifat utama atau primer dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Mampu menjelaskan dan menganalisis tentang fungsi lembaga Negara yang bersifat utama atau primer dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Negara yang bersifat utama (<i>main or primary state organs</i>); Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan BPK</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam menjelaskan dan menganalisis tentang fungsi lembaga Negara yang bersifat utama atau primer dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintan R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan 	5%

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi ▪ Diskusi <p>Test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketatanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara▪ Maruarar Siahaan. 2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta ▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada ▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni ▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ghalia Indonesia ▪ Wiryono Projudikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
5	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis cara pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya; tugas, fungsi dan kewenangannya serta hak anggota. (Tentang DPR)</p>	<p>Mampu menjelaskan dan menganalisis tentang cara pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya; tugas, fungsi dan kewenangannya serta hak anggota. (Tentang DPR)</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam memberikan penjelasan dan menganalisis cara pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya; tugas, fungsi dan kewenangannya serta hak anggota. (Tentang DPR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintang R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 	10%

			<ul style="list-style-type: none"> ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Jakarta: Gaya Media Pratama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011.Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assididqie. 2006.Pengantar 	
--	--	--	---	--	--	---	--

						<p>Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty ▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara ▪ Maruarar Siahaan.2005. 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>1945. Bandung : Alumni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia ▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
6	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hubungan DPR dengan lembaga Negara serta menerapkannya.</p>	<p>Mampu memahami dan menganalisis tentang hubungan DPR dengan lembaga Negara lainnya, serta</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam memahami dan menganalisis tentang hubungan DPR dengan lembaga Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50"")] ▪ <i>Problem Based</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres 	5%

		mampu menerapkannya.	lainnya, serta mampu menerapkannya. <ul style="list-style-type: none"> ● Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 	<i>Learning (PBL)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bintang R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011.Hukum 	
--	--	----------------------	---	-----------------------	---	--	--

						<p>Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none">▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketatanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta :	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Rajagrafindo Persada</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia▪ UUD Negara RI 1945▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
--	--	--	--	--	--	--	--

7	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembentukan jabatan; ▪ cara menempati jabatan; ▪ berakhirnya, tugas, fungsi dan kewenangannya; dan ▪ hak anggota, hubungan DPD dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. 	<p>Mampu memahami serta memberikan penjelasan tentang pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya, tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota, hubungan DPD dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam memberikan penjelasan serta pemahaman tentang pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya, tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota, hubungan DPD dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50"")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintan R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism 	5%
---	--	---	---	--	---	--	----

			<p>Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none">▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketatanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Jakarta :</p> <p>Rineka Cipta</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia▪ UUD Negara RI 1945	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						
9	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cara pembentukan jabatan; ▪ Cara menempati jabatan dan berakhirnya; ▪ Tugas, fungsi, dan kewenangannya, ▪ hak anggota. Hubungan MPR dengan Lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. 	<p>Mampu memahami dan menganalisis cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan MPR dengan Lembaga Negara lainnta, serta mampu menerapkannya.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam memahami dan memberikan analisis tentang materi yang berkaitan dengan menganalisis cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan MPR dengan Lembaga Negara lainnta, serta mampu menerapkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50"")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintang R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar 	5%

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi <p>Test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Presidensialisme Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanta Yuda AR. 2010. <i>Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi</i>. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011. <i>Hukum Tata Negara Indonesia</i>, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. <i>Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara</i>. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. <i>Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara</i>. Jakarta : Konpress 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty ▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara ▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress ▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Indonesia. Jakarta : FH UI</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>HTN Indonesia. Dian Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
10	<p>Mahasiswa mampu menganalisis cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan lembaga kepresidenan dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya (Tentang Lembaga Kepresidenan)</p>	<p>Mampu menganalisis tentang cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan lembaga kepresidenan dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya (Tentang Lembaga Kepresidenan)</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dalam memberikan analisis serta pemahaman tentang cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan lembaga kepresidenan dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press ▪ Bintan R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 	10%

			<p>menerapkannya (Tentang Lembaga Kepresidenan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty ▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara ▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Jakarta : Konpress</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI ▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta ▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada ▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni ▪ Usep Ranawijaya. 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
11	Mahasiswa mampu menganalisis cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan MA dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. (Tentang Mahkamah Agung)	Mampu menganalisis tentang cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan MA	Kriteria: Ketepatan dalam menganalisis tentang cara pembentukan jabatan; Cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta hak anggota.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintang R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan 	10%

		<p>dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. (Tentang Mahkamah Agung)</p>	<p>Hubungan MA dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. (Tentang Mahkamah Agung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Whatsapp 	<p>Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011.Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras 	
--	--	---	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarso. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty ▪ Joeniarso. 1983. Sejarah Ketatanegaraan 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>RI. Jakarta : Bina Aksara</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni ▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia ▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
12	Mahasiswa mampu menganalisis dan memahami cara pembentukan jabatan,	Mampu memahami serta menganalisis tentang cara	Kriteria: Ketepatan dalam memahami serta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan 	5%

	<p>cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya. (Tentang Mahkamah Konstitusi)</p>	<p>pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya.</p>	<p>menganalisis tentang cara pembentukan jabatan, cara menempati jabatan dan berakhirnya; Tugas, fungsi dan kewenangannya, serta hak anggota. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Negara lainnya, serta mampu menerapkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi [TM:1x(2x50"")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<p>(https://mols.unmul.ac.id)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<p>Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bintang R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. 	
--	---	--	---	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Jakarta: Gramedia</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara ▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress ▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI ▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none">▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia▪ UUD Negara RI 1945▪ Berbagai Peraturan	
--	--	--	--	--	--	---	--

						perundang-undangan yang berlaku	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang Lembaga Negara yang Bersifat Penunjang (<i>Auxiliary State Organs</i>): di tingkat nasional atau pusat dan daerah atau lokal yang memiliki sifat <i>constitutional importance</i>	Mampu memberikan penjelasan dan menganalisis tentang Lembaga Negara yang Bersifat Penunjang (<i>Auxiliary State Organs</i>): di tingkat nasional atau pusat dan daerah atau lokal yang memiliki sifat <i>constitutional importance</i>	<p>Kriteria: Ketepatan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang Lembaga Negara yang Bersifat Penunjang (<i>Auxiliary State Organs</i>): di tingkat nasional atau pusat dan daerah atau lokal yang memiliki sifat <i>constitutional importance</i></p> <p>• Bentuk: Non Test</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi <p>Test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintan R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialisme dan Multipartai Di 	10%

			<p>Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Indonesia. Bandung: Mizan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketatanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara▪ Maruarar Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none">▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : Ghalia Indonesia▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
14	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Pusat)	Mampu memahami dan menganalisis materi yang berkaitan dengan fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Pusat)	<p>Kriteria: Ketepatan dalam memahami serta menganalisis fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Pusat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Non Test 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Video Youtube Pembelajaran ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres ▪ Bintan R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan 	10%

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi <p>Test:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialisme dan Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialisme dan Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assididqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2006. Sengketa 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketatanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara▪ Maruarar Siahaan. 2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta ▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada ▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Alumni ▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Ghalia Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> Wiryono Projudikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia UUD Negara RI 1945 Berbagai Peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
15	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Daerah)	Mampu memahami serta menganalisis mengenai fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik	Kriteria: Ketepatan dalam memahami serta menganalisis mengenai fungsi lembaga negara yang bersifat pendukung atau penunjang dalam sistem kekuasaan berdasarkan konsepsi Undang-Undang Negara Republik	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi [TM:1x(2x50")] <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) Via Zoom Meeting Via Video Youtube Pembelajaran Via Classroom Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> Bagir Manan. 2003. Teori Hukum dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Pres Bintan R. Saragih. 1988. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 	10%

		Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Daerah)	Indonesia Tahun 1945 serta mampu menerapkannya (Daerah) <ul style="list-style-type: none"> ● Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis 			<p>Jakarta: Gaya Media Pratama</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dahlan Thalib, Jamin Hamidi,dkk,. 2004. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo ▪ Djayadi Hanan. 2014. Menakar Presidensialism e Multipartai Di Indonesia. Bandung: Mizan ▪ Hanta Yuda AR. 2010. Presidensialism e Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi. Jakarta: Gramedia ▪ Imam Mahdi. 2011.Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Teras ▪ Jimly Assiddiqie. 2006.Pengantar
--	--	---	---	--	--	---

						<p>Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Konpress</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ----- --. 2006. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta : Konpress ▪ ----- --. 2010. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika ▪ Joeniarto. 1980. Sumber-sumber HTN di Indonesia. Yogyakarta : Liberty ▪ Joeniarto. 1983. Sejarah Ketanegaraan RI. Jakarta : Bina Aksara ▪ Maruarar Siahaan.2005. 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konpress</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : FH UI▪ Moh Mahfud MD. 1999. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta▪ Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rajagrafindo Persada▪ Sri Soemantri. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD	
--	--	--	--	--	--	---	--

						1945. Bandung : Alumni <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usep Ranawijaya. 1983. HTN Dasar-dasarnya . Jakarta : ▪ Ghalia Indonesia ▪ Wiryono Projodikoro. 1997. Asas-asas HTN Indonesia. Dian Rakyat ▪ Tiga Undang-Undan g Dasar Indonesia ▪ UUD Negara RI 1945 ▪ Berbagai Peraturan perundang-und angan yang berlaku 	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.